



Tingkatkan Fungsi Pengawasan di Tahun 2021

KETAPANG – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi, mengatakan DPRD telah menetapkan sejumlah rencana kerja untuk tahun 2021. Mulai dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hingga memperkuat lagi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Febriadi mengatakan, untuk pembahasan Raperda, pihaknya telah menetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dalam Propemperda tersebut menyebutkan akan membahas 10 Raperda yang akan dibahas. Dari 10 Raperda ini ada satu Raperda yang

sangat penting yaitu, Raperda tentang Pemekaran Desa.

Dia menegaskan, Raperda ini penting karena luas Ketapang yang sangat luas, sehingga pemekaran desa menjadi sangat penting. Setelah pemekaran desa dilakukan, dia menambahkan, kemudian akan diikuti oleh pemekaran kecamatan. Setelah itu baru pemekaran kabupaten. "Setelah pemekaran desa nanti akan ada pemekaran kecamatan dan pemekaran kabupaten. Untuk memeka-



M. Febriadi

kan kecamatan itu minimal harus 10 desa," kata Febriadi.

"Saya yakin akan terjadi pemekaran kabupaten di Ketapang. Saya dari umur 26 tahun sudah menyuarkan pemekaran kabupaten, bahkan pembentukan provinsi baru di Ketapang. Masalah waktu tidak dapat dipastikan kapan harus terjadi. Tapi saya yakin itu akan terjadi. Kami akan terus berjuang melakukan pemekaran Kabupaten Ketapang untuk kemudian menjadi sebuah provinsi," lanjut pria yang kini berusia 47 ta-

hun itu.

Dia mengungkapkan, dari pemekaran Kabupaten Ketapang sudah ada Kabupaten Kayong Utara. Kemungkinan nanti diperkirakan dia akan ada Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Sandai, baru kemudian Kabupaten Ketapang. Sedangkan untuk Kecamatan Nanga Tayap, Pemahan, Sungai Melayu, dan Tumbang Titi, diperkirakan dia, bisa menjadi kabupaten baru. Dengan demikian, dia memperkirakan, Ketapang akan menjadi lima kabupaten yang layak untuk kemudian menjadi provinsi.

"Pemekaran dari desa dan kecamatan itu yang sangat penting. Salah satu pentingnya pemekaran desa ini con-

tohnya di Kecamatan Kendawangan. Desa Air Hitam di Kendawangan itu sangat jauh. Tentu sangat sulit untuk bisa mengakses daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemekaran desa dan kecamatan," ungkapnya.

Bidang lain yang akan menjadi prioritas DPRD Ketapang di 2021, menurut dia, adalah pengawasan pelaksanaan APBD. Dia berharap pelaksanaan APBD tahun 2021 dapat dilakukan dengan baik. DPRD dipastikan dia, akan lebih intens lagi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. "Fungsi DPRD itu ada tiga yaitu, fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuat perda. Jadi tiga fungsi ini akan lebih diperkuat lagi," pungkasnya. (afi)